

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

1. NOR OQTA HASNIA, tahun 2023, pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, yang berjudul **“Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan”**. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan dan factor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengambil informan penelitian dengan teknik *snowball sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas penertiban pedagang kaki lima di pasar paringin kabupaten balangan tergolong cukup efektif diketahui dari indikator *Pertama*, waktu meliputi target waktu dinilai cukup efektif sesuai dengan jadwal giat operasi, ketepatan waktu penyelesaian tugas kurang baik. *Kedua*, tugas meliputi koordinasi penjelasan tugas dinilai efektif, pendelegasian efektif. *Ketiga*, produktivitas meliputi pencapaian target kerja masih kurang baik. *Keempat*, motivasi meliputi perhatian pimpinan yang cukup efektif melalui arahan, terpenuhinya kebutuhan dengan cukup efektif. *Kelima*, evaluasi kerja meliputi dorongan informasi dari pimpinan yang dinilai

efektif dan sesuai dengan ketentuan, evaluasi kerja kurang baik. *Keenam*, pengawasan meliputi pengawasan dari pimpinan efektif. *Ketujuh*, lingkungan kerja meliputi kondisi lingkungan kerja cukup efektif. *Kedelapan*, perlengkapan dan fasilitas meliputi ketersediaan perlengkapan kerja tergolong memadai dan efektif, fasilitas tergolong kurang efektif. Faktor yang mempengaruhi efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan meliputi faktor pendorong yakni sumber daya manusia yang memadai kemudian koordinasi yang tergolong efektif dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, selanjutnya faktor penghambat diantaranya belum efektifnya penertiban pedagang kaki lima, sosialisasi penataan PKL yang kurang rutin dilakukan, pengawasan melalui patrol terhadap Pedagang Kaki Lima kurang rutin. Adapun perbandingan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti dari segi persamaannya adalah dari jenis metode penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, teknik penarikan informan, teori yang digunakan dan lokasi penelitian. Teknik penarikan informan penelitian terdahulu menggunakan *snowball sampling* sedangkan teknik penarikan informan penulis menggunakan *purposive sampling*. Penelitian terdahulu teori dari Relly sedangkan penulis menggunakan teori dari Campbell J.P (Dyah Mutiarin & Arif Zainudin, (2021:96)”yang dirasa relevan dengan fenomena masalah yang ditemukan, tentu saja hal ini membuat indikator yang digunakan juga berbeda. Selain itu, perbedaannya dari segi lokasi penelitian terdahulu di Pasar Paringin Kabupaten Balangan sedangkan penelitian penulis di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Hardian Widiyanto, 2022, "**Efektifitas Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Daerah Pasar Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi**".

Skripsi. Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thana Saifuddin Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban pedagang yang melanggar peraturan berjualan pada bahu jalan dan trotoar daerah Pasar Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil serta kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- (1) Strategi yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja Tanjung Jabung Barat dalam melakukan penertiban pedagang dengan melakukan sosialisasi terhadap pedagang selama 3 kali patroli, jika masih melanggar maka pelaku pelanggaran dipanggil ke kantor untuk diberikan sosialisasi mendalam namun jika masih melanggar maka akan dilakukan tindak tegas oleh petugas, selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban berupa relokasi pedagang dan melakukan penegakkan undang-undang yang mana pedagang akan diserahkan ke pengadilan untuk diberikan sanksi.
- (2) Hambatan dan kendala yang terjadi dalam melakukan penertiban ada 2 yaitu faktor internal yang terdiri dari kekurangan personel, individu

anggota, kekurangan armada dan faktor eksternal mencakup pemahaman dari pedagang, perlawanan dari pedagang, serta anggaran dari Satpol PP

- (3) Ketentuan mengenai larangan pedagang berjualan pada trotoar dan bahu jalan tertera pada Undang-undang serta Peraturan Daerah.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien. Meskipun sebenarnya ada perbedaan yang sangat tegas di antara ke-duanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai. Sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Term efektif (effective) dan efisien (efficient) merupakan dua terma yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tentang arti dari efektivitas terdapat beberapa pendapat.

Menurut Drucker dalam Nuruddin (Dyah Mutiarin & Arif Zainudin, (2021:96)) menyatakan bahwa efektivitas berarti melakukan sesuatu yang benar atau sejauhmana kita mencapai tujuan. Sementara menurut Handoko (Dyah Mutiarin & Arif Zainudin, (2021:96), efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. Bagi Komaruddin (Dyah Mutiarin & Arif Zainudin, (2021:96), efektivitas adalah suatu keadaan

yang menunjuk-kan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Hasibuan dalam Bormasa (2022:132) Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam sesuatu perbuatan. Efektif dalam kamus bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Gill.Mc.E. dalam Bormasa (2022:132) Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar sumbangan output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Menurut Campbell J.P (Dyah Mutiarin & Arif Zainudin, (2021:96) pengertian efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan Program

Efektivitas keberhasilan program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. keberhasilan program dapat ditinjau dari proses mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan.

2. Keberhasilan Sasaran

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan merupakan kateria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan semakin berkualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.

4. Tingkat input dan output

Pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output) jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan tidak efisien dan sebaliknya jika input lebih besar maka dapat dikatakan tidak efisien

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kateria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja meliputi kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, motivasi kerja, sarana dan prasarana, sistem kerja, serta komunikasi dan koordinasi. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik akan mampu menyelesaikan pekerjaan secara optimal. Kepemimpinan yang efektif dapat mengarahkan dan memotivasi pegawai untuk bekerja lebih produktif, sedangkan motivasi kerja yang tinggi mendorong tanggung jawab dan semangat dalam bekerja. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta sistem dan prosedur kerja yang jelas akan memperlancar pelaksanaan tugas. Komunikasi dan koordinasi yang baik juga menjadi faktor penting untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kerja sama dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang dikemukakan oleh Richard M Steers dalam buku Monica Bormasa (2022:139) sebagai berikut:

1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme

suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran.

2. Karakteristik Lingkungan

Lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektivitas, keberhasilan hubungan organisasi lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan, tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan.

3. Karakteristik Pekerjaan

Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya.

4. Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen

Dengan makin rumitnya proses teknologi dan perkembangan lingkungan maka peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi semakin sulit.

2. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

UPTD Pengelolaan Pasar Negara. UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar meliputi: penataan dan pengaturan, penertiban dan pengamanan, pengawasan kebersihan pasar, pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, dan sewa toko/kios pada pasar. Kurangnya pengawasan dan penindakan pada pedagang, kebersihan dan kerapian pasar yang kotor, Kurangnya prasana seperti lahan parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pasar di Area Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Negara Pada Dinas Perdagangan dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi.

3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang menjual barang di pinggir jalan atau di tempat umum. Pedagang kaki lima atau biasa

disingkat PKL juga disebut sebagai pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah ini sering diartikan bahwa jumlah kakinya adalah lima. Lima kaki adalah dua kaki pengusaha ditambah "kaki" gerobak (tiga roda yaitu dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah jajanan juga biasa digunakan untuk pedagang kaki lima.

PKL sebagai pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap. (Hanjayani et al., 2023)

Pedagang kaki lima merupakan istilah yang berasal dari zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Berasal dari kata five feet yang berarti jalur pejalan kaki lima di pinggir jalan selebar lima kaki. Ruang selebar lima kaki tersebut dijadikan area berdagang kecil sehingga disebut pedagang kaki lima. Tempat berjualan PKL kini tidak sebatas berukuran lima kaki (1.5 meter), tetapi disesuaikan dengan lahan yang ada atau lahan kosong yang dibutuhkan (Hanjayani et al., 2023)

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah bagian dari aktivitas ekonomi dan pencipta lapangan kerja pada sektor informal. Pertumbuhan kegiatan PKL yang cukup pesat tanpa adanya penanganan yang baik dapat mengakibatkan ketidakaturan tata kota. Selain itu banyak PKL yang menjalankan aktivitasnya ditempat-tempat yang seharusnya menjadi ruang publik

sehingga menyebabkan alih fungsi menjadi ruang komersil. Sehubungan dengan itu, keberadaan PKL dan aktivitas perdagangannya perlu ditata, dikelola dan diberdayakan oleh pemerintah daerah (Kapele et al., 2018).

a. Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima umumnya memiliki ciri tidak berijin resmi, menggunakan sumber daya lokal, dan menggunakan ruang publik. Selain itu keberadaan pedagang kaki lima ada karena permintaan kebutuhan keseharian atau kebutuhan sekunder masyarakat (Hapsari, 2017).

Pedagang kaki lima memiliki Pedagang karakteristik tersendiri seperti yang diungkapkan oleh Simanjutak (1989) yang menjelaskan karakteristik pedagang kaki lima meliputi (1) kegiatan usaha cenderung sederhana dan sistem kerjasama serta pembagian posisi kerja lebih fleksibel, (2) pada umumnya skala, modal, dan pendapatan berskala kecil. (3) tidak memiliki ijin usaha (Hapsari, 2017).

(Hapsari, 2017), mengungkapkan bahwa aktivitas suatu kawasan mempengaruhi jenis dagangan pedagang kaki lima. Sarana yang digunakan pedagang kaki lima pada umumnya sederhana dan dibuat supaya mudah untuk berpindah pindah.

b. Faktor Penyebab Munculnya Pedagang Kaki Lima

(CASEY MEILINDA SAPULETE, 2022) faktor penyebab munculnya pedagang kaki lima dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Sempitnya lapangan pekerjaan.

Meningkatnya pengangguran karena kurangnya pekerjaan yang tersedia memaksanya untuk menjadi pedagang kaki lima. Selain itu, tidak seperti pekerjaan sektor formal seperti pemerintahan atau bisnis, bekerja sebagai pedagang kaki lima tidak memerlukan modal atau pendapatan yang signifikan.

2) Kesulitan ekonomi.

Krisis ekonomi tahun 1998 menyebabkan runtuhnya sektor formal, menyebabkan PHK besar-besaran dan memaksa mereka masuk ke sektor informal.

3) Peluang.

Terlepas dari minimnya kesempatan kerja dan krisis ekonomi tahun 1998, munculnya pedagang kaki lima didorong oleh peluang yang sangat besar. Modalnya tidak besar, tidak perlu menyewa tempat, dapat melakukannya sendiri, dan ada keuntungan yang cukup besar. Di sisi lain, kecenderungan konsumsi masyarakat juga menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjadi pedagang kaki lima.

4) Urbanisasi.

Perpindahan yang cepat dari pedesaan ke perkotaan berarti tenaga kerja terserap ke dalam aktivitas penduduk perkotaan yang tidak hanya berpenghasilan tinggi, tetapi juga berpenghasilan menengah bahkan rendah. Hal ini meningkatkan permintaan akan barang atau jasa yang relatif murah.

c. Jenis Dagangan yang dijual Pedagang Kaki Lima

(Hapsari, 2017) Jenis dagangan yang dijual oleh pedagang kaki lima dipengaruhi oleh aktivitas suatu kawasan meliputi:

- 1) Barang mentah dan setengah jadi, jenis dagangan yang dijual ini misalnya sayuran, buah, daging, beras, dan lain lain.
- 2) Makanan siap konsumsi (prepared foods), jenis dagangan ini berupa bahan yang dapat dikonsumsi pada saat itu juga seperti makanan dan minuman.
- 3) Non makanan (non foods), jenis dagangan ini tidak berupa makanan seperti misalnya tekstil hingga obat-obatan.
- 4) Jasa pelayanan (services), dalam jenis dagangan ini yang ditawarkan adalah jasa perorangan seperti tukang reparasi jam, tukang cukur, tukang duplikat kunci, dan lain-lain.

d. Sarana Berdagang Pedagang Kaki Lima

(Hapsari, 2017) sarana berdagang pedagang kaki lima atau PKL dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- 1) Gerobak atau kereta dorong

Sarana berdagang ini masih dikategorikan menjadi dua yaitu yang beratap atau tidak beratap, dimana pedagang kaki lima yang menggunakan sarana gerobak atau kereta dorong lokasi beratap pada umumnya umum berdagangnya menetap, sedangkan yang tidak beratap lokasi berdagangnya berpindah-pindah atau tidak menetap.

- 2) Pikulan atau keranjang.

Pedagang kaki lima yang menggunakan bentuk sarana ini adalah PKL keliling (mobile howker) atau semi menetap dengan maksud supaya barang dagangan mudah dibawa pada saat berpindah lokasi berdagang.

3) Warung semi permanen.

Sarana fisik yang digunakan PKL ini pada umumnya adalah PKL yang berjualan makanan atau minuman. Bangunannya terdiri dari gerobak yang diatur berderet yang dilengkapi dengan meja beserta kursi panjang dan beratapkan terpal atau plastic

4) Kios

Bangunan kios yang digunakan para PKL pada umumnya lokasinya menetap karena kios merupakan bangunan yang semi permanen dengan bahan bangunan berupa papan.

5) Gelaran atau alas

PKL yang menggunakan sarana fisik ini termasuk dalam kategori semi menetap, dimana PKL menjual barang dagangannya di atas kain, tikar, atau semacamnya.

6) Jongko atau meja.

PKL ini yang dikategorikan menetap menggunakan meja, baik yang beratap maupun tidak beratap sebagai sarana untuk menjual barang dagangannya.

Dalam Peraturan Daertah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dalam Pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa pedagang kaki lima (PKL) adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.

4. Ketertiban Umum

Ketertiban umum adalah prinsip mendasar dalam menjaga kehidupan berdampingan yang damai dan berfungsi dalam masyarakat. Pemahaman tentang bagaimana norma-norma sosial, hukum, dan etika saling berinteraksi untuk membentuk kerangka kerja yang memastikan keseimbangan antara hak-hak individu dengan kepentingan bersama sangatlah penting. Upaya menjaga ketertiban umum merupakan tanggung jawab pemerintah, otoritas, dan masyarakat secara keseluruhan. (Rahmadanita: 2023)

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah, dalam bahasa Prancis “orde publik”, dalam bahasa Jerman “*vorbehaltklausel*”, dan di negara-negara dengan sistem *common law* disebut publik *policy*. Istilah *policy* dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politik, dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum.

Ketertiban umum memegang peranan penting, dalam arti setiap sistem hukum negara manapun memerlukan ancaman atau “rem darurat” yang disebut dengan istilah ketertiban umum.

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan prinsip fundamental di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Namun, pendekatan dan konteks pelaksanaannya dapat bervariasi berdasarkan perbedaan budaya, hukum, dan sistem pemerintahan. Di berbagai negara, kepolisian berperan sentral dalam menjaga ketertiban umum dengan memastikan hukum dan peraturan diikuti serta menangani situasi-situasi yang dapat mengganggu keamanan masyarakat. Sementara itu di Indonesia, Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP) memiliki peran krusial dalam memelihara ketertiban umum di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 7 dijelaskan bahwa Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketertiban umum adalah suatu keadaan atau kondisi yang aman, tenang, dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja atau beraktifitas sehari-hari. Ketertiban juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan aman dan teratur, tidak menimbulkan kerusakan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang di daerah tersebut bisa beraktivitas dengan tenang dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku yang menyebabkan tercapainya pekerjaan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur logis mengenai bagaimana efektivitas UPTD Pengelolaan Pasar Negara dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Negara dapat dianalisis dan dipahami secara sistematis. Penelitian ini berangkat dari adanya permasalahan terkait aktivitas PKL yang masih beroperasi di area yang tidak semestinya, sehingga mempengaruhi ketertiban, kebersihan, dan fungsi ruang publik pasar. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penertiban, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga dampak kebijakan yang diterapkan oleh UPTD. Kerangka

pemikiran ini menjadi dasar untuk menganalisis hubungan antarvariabel serta menjelaskan proses penertiban PKL secara komprehensif sesuai tujuan penelitian.

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan akan variabel yang diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independent dan intervening, maka perlu juga dijelaskan mengapa variabel tersebut dilibatkan dalam penelitian. Oleh karena itu untuk menyusun paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka pemikiran.

Kerangka berpikir pada penelitian ini akan dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh Campbell J.P (Dyah Mutiarin & Arif Zainudin, 2021:96) pengertian efektivitas secara umum tersebut yaitu:

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan Terhadap Program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

